

POLICY LEARNING DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF DENGAN MID DAY MEALS SCHEME INDIA

Karmilla Susilawati¹

Universitas Paramadina, Indonesia

karmilla.susilawati@students.paramadina.ac.id

Received: 28-05- 2026

Revised: 03-06-2026

Approved: 26-06-2026

ABSTRAK

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan bentuk kewajiban negara terhadap warga negaranya, Indonesia mengimplementasikan poin zero hunger dalam sustainable development goals yang menjadi agenda global. Makan bergizi gratis merupakan keseriusan Indonesia dalam melakukan intervensi gizi terhadap masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dan melakukan studi komparatif dengan program Mid Day Meals Scheme milik India yang lebih awal menjalankan intervensi gizi kepada masyarakatnya. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan pada pendekatan studi komparatif dan data yang diperoleh berasal dari studi literatur yang kemudian dianalisa menggunakan konsep policy learning untuk dapat mengidentifikasi bentuk implementasi dan tantangan mid day meals India yang ternyata menunjukkan kesamaan tantangan dalam hal distribusi makanan, higienitas dalam pengolahan makanan sampai terjadi keracunan dan pola koordinasi yang sama dengan banyak lembaga hingga mengarah kepada politisasi program karena beberapa kelompok memandang program ini sebagai ladang keuntungan material semata tanpa mempedulikan kualitas implementasi nya sejalan dengan tujuan awal. Penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Indonesia berdasarkan policy learning dari kebijakan Mid day Meals India.

Kata kunci: Makan bergizi gratis, Mid day meals, Policy learning

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah prinsip internasional yang ingin dibentuk dengan tujuan dunia yang lebih adil, bersih dan lebih sejahtera. Badan perserikatan bangsa-bangsa memaparkan mengenai hubungan antara kesehatan dan pembangunan merupakan kolaborasi yang harus dicapai untuk hasil pembangunan berkelanjutan. Agenda global *for change* ini terus mengalami peningkatan setelah 15 tahun pertama memberikan perubahan pada masyarakat internasional, kemudian dilanjutkan pada 2015 untuk 15 tahun kedepan dengan program yang lebih inklusif, berkelanjutan serta holistic. *Sustainable Development Goals* merupakan program lanjutan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki suatu negara (daeli, 2019 h.82). *SDG's* memiliki prinsip lanjutan dari program sebelumnya yaitu mencakup 17 tujuan utama dan berbeda dengan pendekatan pembangunan sebelumnya, *SDG's* menawarkan kerangka kerja yang menyeimbangkan aspek ekonomi, social dan lingkungan. (Alisjahbarani, 2018).

Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilanjutkan atas dasar kesepakatan bersama dengan masyarakat internasional, SDG's mulai diadopsi oleh banyak negara di tahun 2015 yang salah satu poin inklusif nya adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan sejalan dengan target Nutrisi Global Tahun 2025 di dunia guna mengatasi permasalahan gizi. Hal ini merupakan salah satu hambatan utama dari pembangunan sumber daya manusia secara global. Sumber daya manusia menjadi salah satu identitas penting dari sebuah negara, karena mencerminkan negara itu sendiri, pembangunan sumber daya manusia berkualitas juga dapat meningkatkan bangsa yang kompetitif di tengah dinamika global saat ini (Sarjito, 2024 hlm. 130).

Target nutrisi global yang telah ditetapkan oleh dua organisasi internasional dengan enam target utama guna mencapai tujuan dalam mengatasi permasalahan gizi secara global mencakup penurunan *stunting*, *anemia*, *overweight*, *low birth weight*, meningkatkan pemberian ASI eksklusif serta pengurangan wasting. Pada setiap cakupan memiliki angka target masing-masing, seperti contohnya *stunting* dimana hal ini masih menjadi permasalahan global yang dialami banyak negara berkembang. Banyak sekali masyarakat di negara berkembang mengalami *stunting* yang diakibatkan karena malnutrisi kronis sehingga menyebabkan imun yang lemah dan kapasitas kognitif yang tidak maksimal bahkan cenderung menurun, target yang ingin dicapai adanya penurunan sebanyak 40% pada anak balita. Di Indonesia sendiri hubungan antara kesehatan masyarakat dengan kesiapan yang dimiliki negara mengenai ketahanan nasional sangat erat, karena masih terdapat kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Berdasarkan data pusat statistik dan studi World Health Organization (2018) menyatakan hal ini dipengaruhi karena masyarakat Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi, di sisi lain hal tersebut berdampak kepada produktivitas individu. Produktivitas individu ini tidak bisa dianggap hal sederhana karena secara tidak langsung akan berkontribusi kepada Pembangunan ekonomi dan sosial (Sarjito, 2024 h. 130).

Permasalahan gizi yang ada menjadi pendorong berjalannya program Makan Bergizi gratis di Indonesia. Berdasarkan data pusat statistik (2024) menunjukkan tingginya tingkat anak yang tidak bersekolah dan masih rendahnya capaian nutrisi di kelompok tertentu dan rata-rata dialami oleh anak usia sekolah, balita dan ibu hamil dan berdasarkan data dari SSGI 2022 total kasus *stunting* mencapai 21,6%, *anemia* mencapai 32% dan obesitas pada anak sekolah mencapai 10,2%. Hal ini dipengaruhi oleh pola makan yang tidak berdasarkan dengan prinsip gizi seimbang, melainkan tingginya konsumsi gula, garam dan lemak serta rendahnya aktivitas fisik, hal ini akan berdampak secara langsung terhadap produktivitas seseorang yang akan mempengaruhi juga partisipasinya dalam sosial ekonomi suatu negara. Urgensi yang dimiliki Indonesia bukan hanya sekedar narasi melainkan data kongkrit dari tingginya malnutrisi di Indonesia, berdasarkan data Riskesda pada tahun 2018 menunjukkan masalah gizi balita di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 13,9%, angka gizi kurang mencapai 5,7% dan angka gizi buruk mencapai 19,2%. Berdasarkan data SSGI tahun 2021 total kasus

balita stunting di Indonesia sebesar 24,4% sementara overweight sebesar 3,8% dan untuk total kasus wasted (kurus) sebesar 7,1%. Angka total kasus yang ada di Indonesia menjadi salah satu pendorong utama bagi terciptanya sebuah program nasional prioritas yaitu Makan Bergizi Gratis atau secara internasional dikenal dengan *School Feeding* yang sudah diakui oleh WHO dan FAO sebagai bentuk intervensi gizi yang terstruktur. Indonesia akhirnya berhasil mengadaptasi dan menjalankan program prioritas ini dimulai tahun 2025. Selain kepada *Sustainable Development Goals 2030* Indonesia juga memiliki cita-cita besar yang ingin dicapai melalui intervensi gizi anak bangsa ini, sehingga permasalahan gizi tersebut dapat dilihat sebagai isu serius yang harus diatasi dan dijadikan sebagai upaya nasional untuk menargetkan penurunan angka di bawah 5% melalui RPJPN 2025-20245 (Darmawan, 2025).

Bentuk implementasi dari salah satu poin pembangunan berkelanjutan Indonesia membentuk Program makan bergizi gratis sebagai bentuk intervensi gizi karena berdasarkan dari data Kementerian Kesehatan dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan angka yang mengejutkan bahwa 41% siswa di Indonesia mengalami kelaparan yang berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan (Kiftiyah, 2025). Tentu saja ini bukan hal mudah yang dapat dijangkau oleh Indonesia, dapat dikatakan ini merupakan program berskala besar yang pertama kali dijalankan oleh Indonesia. Permasalahan distribusi makanan, kualitas makanan dan transparansi terhadap anggaran makan bergizi gratis menjadi beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dan juga menjadi perhatian banyak masyarakat. Kolaborasi erat dan transparansi lembaga terhadap distribusi berjalan nya program ini sangat diperlukan guna mencapai implementasi yang sesuai dengan tujuan awal.

Berdasarkan tantangan yang dihadapi Indonesia menunjukkan bahwa dalam implementasi program berskala besar ini diperlukan adanya *policy learning* agar dapat mengidentifikasi praktik yang paling efektif serta permasalahan apa saja yang bisa diantisipasi oleh Indonesia. Dalam perspektif *policy learning* pengalaman dari negara yang sudah lebih dulu menjalankan program serupa memiliki penilaian lebih untuk dapat mengambil pembelajaran atas tantangan yang bisa diantisipasi, terlebih memiliki kesamaan geografis dan demografis menjadi nilai tambah. Indonesia mengunjungi beberapa negara untuk melakukan studi banding, namun dalam penulisan ini memfokuskan India sebagai negara objek *policy learning* untuk Indonesia dalam pelaksanaan program bergizi secara gratis ini. Hal tersebut dikarenakan secara geografis dan demografi India memiliki kesamaan dengan Indonesia, serta keberhasilan India sudah diakui secara internasional dari program *Mid-Day Meal scheme* nya dari kelompok negara berkembang pada saat itu.

Ada beberapa konsep yang mendukung dalam pengambilan formulasi kebijakan publik dalam *policy learning*, salah satunya adalah *political learning* yang dikembangkan oleh seorang tokoh Hecllo, *policyoriented learning* yang dikembangkan oleh Sabatier dan dua konsep ini menjadi salah satu yang digunakan oleh para analis untuk menjelaskan tendensi dari sebuah kebijakan publik yang berangkat dari basis pengetahuan atau pengalaman yang terdahulu. *Policy Learning* ini hampir memiliki kesamaan dengan evaluasi kebijakan karena keduanya

berangkat dari dasar yang sama yaitu menilai hasil kebijakan yang telah dilakukan, namun yang membedakan sebuah *policy learning* ini menggambarkan seluruh proses tahapan kebijakan yang dimulai dengan agenda setting, formulasi kebijakan, implemementasi kebijakan, monitoring kebijakan nya, sampai kepada evaluasi kebijakan sehingga dapat mengambil pembelajaran agar kedepannya bisa mengambil langkah dan kebijakan yang lebih komprehensif (Irawan, 2021 h.130)

Keberhasilan yang dicapai oleh India dipengaruhi karena program tersebut berangkat dari dasar hukum yang sangat kuat yaitu sebuah mandat dari Mahkamah Agung India kemudian seiring berjalannya waktu diperkuat melalui *National Food Security Act* (Naue, 2026 h.919). Keberhasilan ini juga menjadi pendorong tulisan ini memfokuskan India dalam perspektif *policy learning* untuk menjadi sumber pembelajaran bagi pembuat kebijakan di Indonesia dalam memperbaiki implementasi program makan bergizi gratis.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau pernyataan dari tokoh yang bisa diamati. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif yang memperoleh data melalui studi pustaka resmi yang bersumber dari artikel nasional, internasional yang terkait dengan tema tulisan dan beberapa data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Indonesia dan India. Penelitian ini menggunakan perspektif *policy learning* dengan tujuan mengetahui bagaimana India mengatasi tantangan dari program nya, sehingga menjadi sumber pembelajaran yang berpotensi diadaptasi dalam implementasi makan bergizi gratis. Pemilihan India sebagai pembanding karena sudah lebih dulu memiliki pengalaman implementasi program yang sama, kesamaan tantangan yang relevan juga menjadikan India sebagai sumber *policy learning* yang sesuai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tantangan Implementasi Makan Bergizi Gratis

Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program berskala besar yang dijalankan oleh Indonesia, yang sejalan dengan tujuan besarnya melakukan intervensi gizi kepada masyarakat, sehingga dapat menciptakan generasi produktif yang berdampak kepada sosial ekonomi negara. Namun hal ini tentu saja bukan sesuatu yang sederhana dalam implementasinya karena membutuhkan dana yang cukup besar dan kolaborasi antar lembaga yang luas demi mensukseskan program agar bisa berjalan sesuai tujuan awal. Program ini dirancang dengan pendekatan multisektoral yang mengintegrasikan mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, kolaborasi yang luas sejalan dengan target penerima manfaat program ini sekitar 82 juta jiwa yang meliputi, 44 juta anak usia sekolah, 30 juta balita, 4 juta santri dan 4 juta ibu hamil menjadi target penerima manfaat utama. Program makan bergizi gratis juga dirancang untuk menjangkau 439.000 satuan pendidikan dengan dukungan dan kolaborasi dari 48.000 dapur layanan atau unit distribusi (Agustin, 2025).

Tantangan gizi buruk di Indonesia yang cukup tinggi sudah menjadi sebuah tantangan, sehingga implementasi program makan bergizi gratis menjadi konsentrasi masyarakat dalam mengawal berjalan nya program ini agar sejalan dengan tujuan awal. Pada sisi pemerintah sama program makan bergizi gratis ini dijadikan salah satu program prioritas yang bertujuan bukan hanya memperbaiki gizi anak melainkan menurunkan ketimpangan pada akses pendidikan yang tinggi. Karena kasus gizi buruk serta ketimpangan dalam akses pendidikan ini bukan hanya berdampak kepada fisik anak saja melainkan memiliki efek domino terhadap perkembangan kognitif dan emosional seseorang yang nantinya mempengaruhi kemampuan untuk menyerap pembelajaran di sekolah dan juga partisipasinya dalam pendidikan. Berdasarkan praktik internasional dan studi global (WFP African union dan World Bank) menunjukkan bahwa pemberian makan bergizi di sekolah terbukti mempengaruhi peningkatan partisipasi pendidikan, konsentrasi belajar dan pemerataan kesejahteraan sosial (Agustini, 2025 h. 363).

Implementasi makan bergizi gratis di Indonesia bukan hal yang mudah, karena mulai terlihat polanya pada evaluasi awal. Tantangan awal yang menjadi perhatian masyarakat luas adalah ketidaksesuaian menu dengan standar gizi. Kendala ini mendapatkan respon cukup besar, karena ketidaksesuaian dengan standar gizi berarti sama dengan keluar dari tujuan awal program ini dijalankan. Permasalahan kedua yang sangat memicu kemarahan dari masyarakat adalah keracunan, berdasarkan data dari badan gizi nasional terdapat kasus keracunan mencapai 5.914 yang mengalami keracunan per tanggal 26 September 2025 yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh kepala BGN yang menyatakan 46% dari total kasus keracunan yang terjadi adalah berasal dari program makan bergizi gratis (Karkasa, 2026 h.926). Permasalahan lainnya seperti distribusi makanan ke setiap sekolah-sekolah yang membutuhkan durasi panjang karena jarak dan kondisi lalu lintas juga ditemukan dalam implementasi nya, hal ini berpengaruh kepada penurunan kualitas makanan ketika sampai ke sekolah. Menu yang tidak sesuai dengan standar gizi juga memicu sentimen masyarakat yang mempertanyakan kualitas menu tidak sebanding dengan anggaran besar yang digunakan untuk mendorong berjalannya program ini. Akuntabilitas beberapa lembaga dinilai kurang terhadap pengeluaran dana untuk menjalankan program ini setiap harinya, sehingga memicu kemarahan di masyarakat karena menilai tidak ada transparansi dan korelasi dari anggaran dan kualitas program itu sendiri.

Secara garis besar permasalahan makan bergizi gratis di Indonesia dikategorikan menjadi 2 poin, yaitu terkait sumber daya dan struktur birokrasi dan koordinasi. Perihal dengan sumber daya pada beberapa daerah memiliki keterbatasan akses terhadap pangan, mengenai struktur birokrasi dan koordinasi ini apabila diperkecil lagi mengarah keada transparansi anggaran dan pengeluaran yang terbilang cukup besar. Hal ini menjadi perhatian masyarakat karena dikhawatirkan menjadi ladang korupsi bagi beberapa oknum yang memandang program ini hanya sebagai keuntungan material, karena pada pelaksanaan nya auditor yang aktif dalam pengawasan terbilang rendah, terlebih partisipasi masyarakat juga terbatas karena dipengaruhi oleh rendahnya literasi mengenai ini

dan keterbatasan akses informasi untuk publik (Zulaika, 2025 h.432).

Implementasi Mid day Meal Scheme India

Pertama kali pemerintah India meluncurkan program *midday meal* ini di tahun 1995 dengan tujuan awal adalah meningkatkan partisipasi siswa untuk hadir di sekolah dan juga untuk mengurangi kelaparan, di awal program ini mencakup 125 juta anak di sekolah negeri dan sekolah bantuan pemerintah. Demi mensukseskan program ini pemerintah menggelontorkan dana sebesar US\$ 2,8 Miliar yang menurut data Studi WFP PBB menunjukkan bahwa setia US\$ 1 yang digunakan untuk program makan siang di sekolah ini mampu memberikan dampak besar bagi ekonomi negara sebesar US\$ 9. Program *Mid day meal scheme* India ini juga melibatkan banyak kerja sama antar kementerian dan lembaga swadaya masyarakat yang beberapa diantaranya terdiri atas Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian (INDEF, 2024).

Target masyarakat yang luas dalam intervensi gizi juga dirasakan oleh India yang lebih dahulu menjalankan program pemberian makan bergizi kepada anak-anak di negaranya. India menjadi salah satu negara yang memiliki populasi umur anak terbesar di dunia, namun sayangnya sebagian besar dari populasi besar anak-anak tersebut berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah bahkan dapat dikatakan secara ekonomi sebagai masyarakat miskin. Hal ini sangat memberikan efek domino bagi anak-anak tersebut, karena pola pengasuhan sering sekali tidak fokus kepada pendidikan anak-anak melainkan dianggap sebagai sebuah investasi bagi keluarganya sehingga anak-anak tersebut sudah didorong untuk bekerja sejak dini bahkan sejak umurnya belum memasuki umur dewasa menurut undang-undang. Bahkan anak-anak di garis bawah kemiskinan ini tidak dapat merasakan makanan yang cukup secara gizi dalam mendukung pertumbuhannya, anak-anak yang diharapkan menjadi masa depan keluarga bahkan bangsanya justru mengalami malnutrisi total. Berdasarkan statistic anak-anak yang kurang beruntung ini ada 19,8 juta di bawah usia 6 tahun yang mengalami kekurangan gizi dan 36% dari total keseluruhan anak-anak di India memiliki berat badan yang kurang dari ideal berdasarkan umurnya.

Berangkat dari kesadaran ini menjadi sebuah tugas negara dalam menyelesaikan permasalahan gizi masyarakatnya, akhirnya pemerintah India meluncurkan sebuah program *Mid day Meal scheme* guna mencapai tujuan yang universal pendidikan dasar bersama dan perlindungan hak gizi anak-anak. Program *mid day meal scheme* ini diperkuat menjadi sebuah undang-undang hak atas pangan di India dan diperkukuh lagi regulasinya melalui *National Food Security Act*. Pemerintah India menetapkan ini menjadi program prioritas dengan tujuan melindungi hak atas pangan anak-anak yang juga menekankan hak atas pendidikan, hak untuk tumbuh dan hak untuk berkembang (Dey, 2019).

Program *mid day meal scheme* menargetkan bahwa semua anak sekolah negeri dari kelas 1 hingga kelas 8 wajib menerima makanan matang bergizi di sekolahnya. Secara data keseluruhan target pemerintah sendiri atas *midday meal* ini sebanyak 125 juta anak, bisa dibandingkan dengan target program makan bergizi gratis di Indonesia yang lebih sedikit sehingga memang wajar *mid day meal* India ini dinobatkan sebagai program makan bergizi paling besar di dunia.

Keseriusan, keselarasan antar pemerintah dan lembaga menjadi sinergi baik dalam mensukseskan program ini. Pengukuhan menjadi sebuah undang-undang hak atas pangan adalah sebuah upaya untuk bisa memperkuat regulasi program ini, terbukti dengan persentase kemiskinan India di angka 47,8% pada tahun 1990 telah berkurang pada tahun 2011-2012 menjadi 12,9% bahkan melebihi target awal pemerintah yaitu penurunan ke angka 23,9% pada tahun 2015 (Stanie, 2011 h.5).

Meskipun India terbilang lebih awal dalam melaksanakan program makan siang di sekolah, namun pada awal pelaksanaan *mid day meals* di India juga mengalami beberapa tantangan yang cukup signifikan baik tantangan dalam bentuk regulasi ataupun tantangan secara praktik dalam menjalankan program *Mid day Meal scheme* ini. Perihal implementasi secara lapangan dan praktik nya, pada awal India juga mengalami tantangan karena adanya keterlambatan distribusi makanan ke sekolah-sekolah sehingga berdampak kepada kualitas makanan yang sudah menurun serta kurangnya fasilitas air hingga praktik memasak dan penyajian yang kurang higienis (Naue, 2026 h. 920).

Secara regulasi dalam *mid day meals* ini juga melibatkan banyak institute tergabung dan India juga mengalami tantangan pada partai politik yang memandang program ini hanya sebagai keuntungan statistic tanpa memperdulikan kondisi di lapangan dan kualitas dari makanan yang akan diberikan kepada anak-anak di India. Keuntungan politik dijadikan sebuah prioritas dibandingkan pemahaman realitas lapangan, sehingga hal ini berdampak besar kepada implementasi di lapangan dan distribusi makanan kepada anak-anak di sekolah sampai kepada kualitas makanan yang kurang pengawasan secara ketat berakibat terjadinya kematian pada 23 siswa di Bihar karena keracunan dan setelah ditelusuri lebih lanjut makanan yang dikonsumsi oleh 23 siswa tersebut mengandung pestisida berasal dari minyak yang digunakan secara berulang dan tidak ada pergantian. Hal ini menjadi kendala besar dalam mewujudkan intervensi gizi kepada anak-anak agar terjadinya peningkatan nilai gizi yang baik, hal sebaliknya justru terjadi karena sampai menimbulkan korban dan anak-anak lainnya mengalami diare sehingga hal ini menimbulkan respon kekhawatiran besar atas apa yang terjadi dan orang tua akhirnya menolak mengkonsumsi makanan yang diberikan (Patil, 2022 h. 9).

Atas seluruh permasalahan yang dialami India dalam program *mid day meals* nya pemerintah India terus mencari solusi yang tepat guna mengurangi dampak dari permasalahan yang ada. Solusi yang dilakukan oleh pemerintah India terkait kebersihan makanan yang menjadi isu cukup besar adalah menggabungkan seluruh aturan persiapan dan penyimpanan makanan menjadi sebuah prosedur operasi standar yang kuat. Selain pengecekan bahan baku yang digunakan, pemerintah juga mewajibkan adanya pemeriksaan rutin terhadap staff dan juga juru masak yang terlibat dalam proses pembuatan makanan di program ini. Pengawetan sampel serta pengajuan laboratorium makanan juga diambil menjadi solusi untuk mencegah keracunan terjadi lagi dan pengujian laboratorium ini diambil secara acak setiap bulannya (Berry, 2020 h.10)

India berupaya terus untuk dapat memenuhi kebutuhan negeri dalam hal memproduksi bahan baku sendiri seperti beras dan gandum untuk pemenuhan

pangan masyarakatnya, India percaya bahwa negara bisa memainkan peran penting dalam kebijakan pertanian berdasarkan konstitusi. Terlebih dengan program *mid day meals* ini India semakin banyak membutuhkan pangan secara rutin karena setiap harinya program terus berjalan, berangkat dari ketidak inginan terlalu bergantung kepada pihak luar dan bentuk keseriusan dalam intervensi gizi masyarakat terutama anak-anak di India maka pemerintah nya mengesahkan *The Indian National Food Security Act* pada 12 September 2013 yang bertujuan untuk melakukan subsidi pangan guna memenuhi kebutuhan 1,2 juta jiwa di India. Rancangan undang-undang keamanan pangan juga dilakukan percepatan pengesahannya dengan tujuan mengatur harga jual bahan makanan pokok, terutama subsidi bahan pangan untuk warga miskin India, undang-undang keamanan pangan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kenaikan harga. Di dalam nya juga mengatur pembagian untuk masyarakat sehingga pemerintah India mempersiapkan anggaran mencapai 18 miliar dollar untuk memastikan 75% populasi di India bagian pedesaan dan 50% mendapatkan 5 kilogram biji-bijian per bulan dengan subsidi sebesar 3 rupee atau senilai 5 sen dollar untuk beras dan untuk gandum sebesar 2 rupee per kilogram. Tujuan besar dari pengesahan undang-undang keamanan pangan ini yaitu mempermudah akses pangan dan mendukung petani dalam negeri, keseriusan pemerintah India dalam menjalankan program *mid day meal scheme* ini sudah diakui secara internasional dan salah satu faktor keberhasilan ini dipengaruhi karena India memiliki dasar hukum yang kuat yaitu melalui *National Food Security Act (NFSA)* tahun 2013.

Tabel 1. Perbandingan **Policy Learning**

Dimensi Policy Learning	India	Indonesia
Keamanan pangan	Permasalahan: Keracunan makanandi Bihar Respon: pemeriksaan rutin staff yang terlibat dan pengawetan sample menu serta pengajuan laboratorium setiap bulan	Permasalahan: terdapat kasus keracunan di beberapa daerah Respon: BGN meresmikan pedoman sertifikasi pangan, standar higiene
Monitoring program dan evaluasi program	Permasalahan: monitoring program dan evaluasi Respon: Pemerintah India serius dengan membentuk Joint Review Mission guna mengevaluasi alur pendanaan juga distribusi makanan tiap daerah	Permasalahan: mekanisme monitoring MBG masih dalam pengembangan karena masih terbelang baru untuk sebuah program Respon: BGN menerapkan audit dan evaluasi berkala
Koordinasi lembaga	Permasalahan: keterlibatan lembaga yang banyak Respon: Penguatan program memiliki dasar hukum NFSA menjadi salah satu bentuk acuan agar memperjelas pembagian peran dari pemerintah pusat, daerah dan komite sekolah yang terlibat dalam program	Permasalahan: Koordinasi

Rekomendasi kebijakan atas permasalahan Makan Bergizi Gratis di Indonesia berdasarkan *Policy Learning* dari India

1. Pengukuhan program yang memiliki dasar hukum seperti pembentukan National Food Security Act karena NFSA ini lebih memfokuskan kepada tindakan dalam berjalannya program serta memiliki payung hukum yang lebih kuat untuk mengatur distribusi kepada penerima manfaat. Karena NFSA fokusnya lebih kepada hak masyarakat dalam mendapatkan akses pangan dan apabila terdapat kegagalan dalam proses distribusinya terdapat mekanisme jelas untuk pengaduan dan ada aturan serta hukum yang berlaku
2. Pengawasan rutin bukan hanya terhadap bahan baku melainkan juga staff yang turut serta dalam pembuatan meals juga menjadi salah satu bentuk solusi yang perlu dilakukan, karena di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus keracunan di wilayah yang berbeda-beda.
3. Pengecekan sampel melalui laboratorium guna mendeteksi keamanan pangan yang digunakan belum santar terdengar dalam implementasi MBG
4. Indonesia perlu mempertimbangkan pengembangan fasilitas produksi makanan yang lebih terintegrasi langsung dengan sekolah, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan ini juga berpengaruh kepada distribusi makana, sehingga menurunkan angka penurunan kualitas makanan dalam perjalanan dengan ini pengawasan makanan juga lebih terpantau. Karena dalam siaran pers kementerian keuangan 2025 lalu MBG merupakan program prioritas yang harus tetap dijalankan namun sisi lainnya juga perlunya perhatian khusus agar defisit anggaran terjaga.

KESIMPULAN

Secara garis besar Indonesia dengan India memiliki beberapa tantangan yang hampir serupa ketika proses implementasi program intervensi gizi ke masyarakatnya. Indonesia dapat mengadaptasi beberapa solusi kebijakan yang diambil oleh India guna menangani permasalahan yang terjadi, salah satu poin terbesar nya adalah penguatan payung hukum melalui *national food security act* dengan tujuan untuk memastikan akses terhadap pangan dapat dinikmati oleh masyarakat, jadi bukan hanya memastikan ketersediaan pangan saja namun terjadinya ketimpangan dalam aksesnya. Bagi Indonesia dengan adanya penunjukan kepala BGN terbaru diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang lebih efisien dan memperkuat proses implementasi nya tidak berjalan keluar dari tujuan awal program ini dibentuk. Studi komparatif ini disusun dengan harapan menjadi salah satu rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan juga nilai atau konteks nasional sehingga kebijakan yang diambil oleh India dalam menangani permasalahan yang hampir sama dengan Indonesia dapat diadaptasi dengan nilai lokal. Dalam analisa permasalahan dan solusi yang diambil oleh pemerintah India, pembentukan NFSA ini lebih memiliki perkembangan yang progresif karena lebih menekankan kepada kewajiban negara yang bukan hanya pemenuhan pangan melainkan pemenuhan hak ini dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel & Jurnal Ilmiah

- Agustini. Ucu & Mulyani. Sri. 2025. *Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidik di Indonesia*. Jurnal Kiprah Pendidikan. Universitas Nusa Putra. Volume 4(363)
- Alisjahbana. Salsiah, Armida& Murniningtyas. Endah. 2018. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Univeritas Padjajaran Press. Bandung. Unpad Press
- Darmawan. Putri, Rizky Annisa. Nabiilahramadhany, farraastsabitah. Dkk. 2025. *Program MBG: Antara Hak Anak atas Gizi dan Kewajiban Negara Terhadap Warga*. Jurnal ilmiah bidang sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan pendidikan. Institut teknologi Kalimantan. Volume 1.
- Dey. Rituparna. 2019. *An Overall Scenario of Mid Day Meal in India Across Different States Over Time*. International Journal of Development Research. Volume 9.
- Irawan. Sodiq, Fajar. 2021. *Policy Learning dalam Formulasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah: Insight dari Gunungkidul*. Indonesian Journal of Political Studies. Volume 1.
- Karkasa. Fannaan, Leader Alvito. Widuri. Amanda, ayu Ailsa. Dkk. 2026. *Kasus Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Siswa: Tinjauan Nilai Kemanusiaan Sila Kedua Pancasila dalam Perspektif Keamanan Pangan dan Tanggung Jawab Negara*. Jurnal Ilmiah Nusantara. Volume 3.
- Kiftiyah. Anifatul. Palestina, ayu firda. Dkk. 2025. *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik*. Jurnal Keindonesiaan Volume 5.
- Naue. Putri, pratiwi A. Raihani. Rifqa siti. Marsal, irsyaf. *Perbandingan Yuridis Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Pangan: Studi Komparatif Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dan Mid-Day Meal Scheme di India*. Jurnal Hukum Islam dan Humaniora. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Volume 5.
- Patil. J Ramesh, Dr. 2022. *Impact and Challenges of Midday Meal Scheme in India*. Journal of Advanced Multidisciplinary Research Studies and Development. Volume 1.
- Sarjito, Aris. 2024. *Free Nutritious Meal Program as a Human Resource Development Strategy to Support National Defense*. International Journal Administration Business and Organization Vol. 5.
- Stanie. Dewinta. 2015. *Peran UNDP dalam Pencapaian Millenium Development Goals untuk Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan di India*. Universitas Riau. Volume 2.
- Syamsu. Faisal, Rachmat. Putry, Anisha Resty. Dkk. 2025. *Tinjauan Nilai Gizi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden RI*. Jurnal Kesehatan Tambusai. Universitas Muslim Indonesia. Volume 6.
- Zulaika. Nurfitri, Lestari. Desty& Istiqomah. Hanifah. 2025. *Tantangan Implementasi dan Akuntabilitas Anggaran Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025*. Jurnal Penelitian Ilmiah

Multidisipliner. Volume 1.

Dokumen Lembaga

Rajya Sabha Secretariat. (2016). *Parliamentary Debates: Rajya Sabha Official Report*. Parliament of India.

Siaran Pers APBN 2025: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Siaran-Pers-APBN-2025> diakses pada 25 Juni 2026

Publikasi Elektronik

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/maharashtra-govt-issues-sop-to-curb-food-poisoning-in-mid-day-meals/articleshow/123047818.cms>
diakses pada 25 Juni